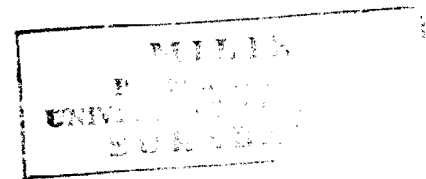


SKRIPSI

FITRI MAYASARI

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

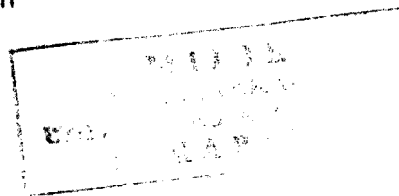


**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI

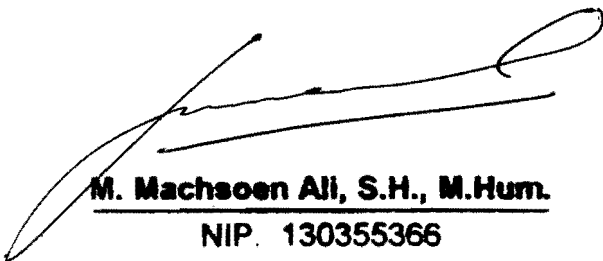
SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



Pembimbing

Penyusun,



M. Machsoen Ali, S.H., M.Hum.
NIP. 130355366



Fitri Mayasari
NIM. 039714571

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

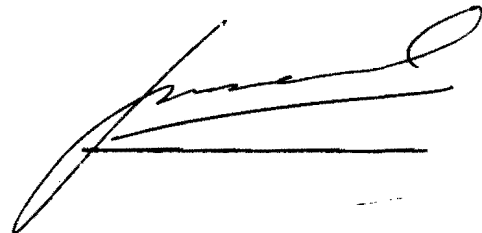
Telah diuji pada tanggal 25 Juni 2001

TIM PENGUJI SKRIPSI :

Ketua : R. Indarsoro, S.H.



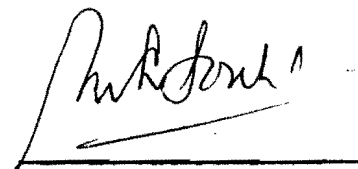
Anggota : 1. M. Machsoen Ali, S.H., M.S.



2. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



3. Dr. M.L. Souhoka, S.H., M.S.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Usaha pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah dengan mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan perekrutan, pemberangkatan dan pemulangan TKI. Selain itu juga pemerintah juga menentukan para pihak yang berkaitan dengan penempatan TKI ke luar negeri, serta tanggung jawab masing-masing pihak atas nama TKI.

Perlindungan hukum bagi TKI dalam penempatannya ke luar negeri telah dijamin sepenuhnya oleh negara. Perlindungan hukum bagi TKI meliputi dari daerah asal TKI, selama di negara tujuan sampai pulang ke daerah asalnya lagi. Dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang terkait, telah mengatur tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal perlindungan. Tetapi dalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak yang berorientasi pada keuntungan, jadi bagaimana untuk mendapat hasil sebesar-besarnya dengan menekan pengeluaran. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dalam hal ini BP₂TKI menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi penempatan TKI ke luar negeri karena BP₂TKI dianggap mampu untuk bersikap netral.

B. Saran

1. Adanya evaluasi Balai Latihan Kerja luar negeri untuk akreditasi. Hal ini menghindari kesan bahwa PJTKI telah terbiasa dengan penempatan TKI yang asal comot dari desa-desa dengan hanya polesan sedikit tambahan keterampilan.
2. Mendayagunakan juru penerang di daerah, untuk memudahkan akses ke Departemen Tenaga Kerja dan PJTKI serta meningkatkan akses Jaringan Sistem Informasi, sehingga dapat memperluas kesempatan bagi siapa saja yang ingin menjadi TKI untuk bekerja di luar negeri.
3. Adanya evaluasi atas kinerja Perwada sehingga Perwada tidak asal-asalan dalam menjalankan tugasnya di daerah.
4. Membentuk suatu dewan khusus untuk menangani masalah TKI Perwakilan Republik Indonesia, dimana penempatan TKI dilakukan. Dewan ini melakukan kegiatan rutin seperti pembinaan dan atau bisa juga dengan wajib lapor tiap sebulan sekali bagi TKI atau hal lainnya yang tujuannya membuat pertemuan rutin antara TKI dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat TKI bekerja atau personilnya.
5. Memaksimalkan fungsi Badan Koordinasi Penempatan TKI (BKPTKI) dan Balai Pelayanan Penempatan TKI (BP₂TKI) dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas dan perlindungan TKI.